

## PENERAPAN GREEN BUDGETING DALAM PERENCANAAN ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI PADA DLHK DIY)

Astrid Cintya Putri<sup>1</sup>, Mia Rosmiati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Administrasi Keuangan Publik, Universitas Padjadjaran

Email Korespodensi: astrid22004@mail.unpad.ac.id

Email: m.rosmiati@unpad.ac.id

### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of *green budgeting* in budget planning to support sustainable development at the Environmental and Forestry Agency (DLHK) of the Special Region of Yogyakarta. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the implementation of *green budgeting* in DLHK DIY is still at an early stage and has not been systematically integrated into the regional budgeting process. Although environmental aspects have been incorporated into planning documents and supported by instruments such as *climate budget tagging*, environmental indicators, and monitoring systems, their utilization remains limited and has not fully supported evidence-based decision-making. The main challenges include limited budget allocation, data availability, human resource capacity, and suboptimal coordination among government agencies. In addition, the absence of a structured *green budgeting* framework hinders the comprehensive integration of environmental aspects into the budgeting cycle. Despite these limitations, existing budget planning has contributed to sustainable development, particularly in waste management and pollution control. Therefore, strengthening the integration of policy, budgeting, and program implementation is necessary to enhance the effectiveness of *green budgeting*. This highlights the need for a transformation in budget governance that is more integrated, adaptive, and oriented toward environmental performance. Consequently, *green budgeting* should not only function as an administrative tool but also as a strategic policy instrument in improving environmental quality in a sustainable manner.

**Keywords:** *Green budgeting*, Budget planning, Sustainable development, Environmental governance.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *green budgeting* dalam perencanaan anggaran untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *green budgeting* di DLHK DIY masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi secara sistematis dalam proses penganggaran daerah. Meskipun demikian, aspek lingkungan telah mulai diakomodasi dalam dokumen perencanaan serta didukung oleh instrumen seperti *climate budget tagging*, indikator lingkungan, dan sistem monitoring. Namun, pemanfaatan instrumen tersebut belum optimal dan belum sepenuhnya mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, data, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antar perangkat daerah yang belum optimal. Selain itu, belum adanya kerangka *green budgeting* yang terstruktur juga menjadi hambatan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan secara menyeluruh ke dalam siklus penganggaran daerah. Meskipun demikian, perencanaan anggaran yang dilakukan telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi kebijakan, penganggaran, dan implementasi program agar penerapan *green budgeting* dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pembangunan

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

91

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



berkelanjutan. Penguatan tersebut menegaskan pentingnya transformasi tata kelola penganggaran yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis kinerja lingkungan. Sehingga, *green budgeting* tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga berperan sebagai strategi kebijakan dalam mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Green budgeting*, Perencanaan anggaran, Pembangunan berkelanjutan, Lingkungan hidup.

## PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu agenda utama dalam kebijakan pembangunan, baik di tingkat global maupun nasional. Isu lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan degradasi sumber daya alam menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Aktivitas manusia yang semakin intensif turut meningkatkan tekanan terhadap lingkungan hidup dan memicu berbagai permasalahan ekologis (Kusumawati et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan dampak yang luas, mulai dari penurunan kualitas lingkungan hingga meningkatnya risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan pembangunan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah *green budgeting*, yaitu sebuah pendekatan visioner yang dirancang untuk memasukkan prinsip keberlanjutan ekologis ke dalam proses perencanaan anggaran pemerintah (Fathia, 2025). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap program yang dilaksanakan. Dengan demikian, kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keberlanjutan. Selain itu, *green budgeting* mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pendekatan ini juga membantu pemerintah dalam mengarahkan prioritas pembangunan yang lebih ramah lingkungan (OECD, 2021). Oleh karena itu, penerapan *green budgeting* menjadi semakin relevan dalam konteks pembangunan saat ini.

Di Indonesia, penerapan *green budgeting* telah mulai dikembangkan melalui berbagai kebijakan dan instrumen fiskal. Salah satu instrumen yang digunakan adalah *Climate Budget Tagging* (CBT), yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan anggaran yang berkaitan dengan perubahan iklim (Mutmainah et al., 2025). Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat mengetahui kontribusi anggaran terhadap kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Badan Kebijakan Fiskal, 2024). Namun demikian, alokasi anggaran untuk sektor perlindungan lingkungan masih relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang ada (Putra, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara urgensi permasalahan lingkungan dengan dukungan fiskal. Selain itu, integrasi aspek lingkungan ke dalam kebijakan anggaran juga belum sepenuhnya optimal.

Pada tingkat daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang cukup kompleks, seperti pengelolaan sampah, pencemaran, serta tekanan akibat urbanisasi (Erik, 2018). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY pada tahun 2024 tercatat sebesar 68,44 dan masih berada pada kategori sedang, meskipun telah melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di DIY masih memerlukan perhatian lebih. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi turut mendorong peningkatan volume sampah. Keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah juga menjadi tantangan yang perlu diatasi secara berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup. DLHK bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Selain itu, DLHK juga berperan dalam proses perencanaan anggaran yang mendukung program-program tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK DIY menunjukkan bahwa tingkat realisasi anggaran DLHK

DIY dalam beberapa tahun terakhir berada di atas 90%, yang mencerminkan kapasitas kelembagaan yang cukup baik. Namun demikian, tingginya realisasi anggaran belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas dalam menjawab permasalahan lingkungan.

Meskipun berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan, penerapan *green budgeting* di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antar perangkat daerah juga masih belum berjalan secara optimal dalam menangani isu lingkungan yang bersifat lintas sektor. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *green budgeting* belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem penganggaran daerah.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi *green budgeting* di tingkat daerah masih belum optimal. Permasalahan yang sering muncul antara lain keterbatasan data, belum adanya indikator yang terukur, serta lemahnya koordinasi antarinstansi (Salahudin et al., 2025). Penelitian oleh Vanessa et al. (2025) menyatakan bahwa sudah ada upaya integrasi isu lingkungan ke dalam dokumen perencanaan, tetapi pelaksanaannya masih parsial, tidak ada regulasi khusus, indikator kinerja lingkungan belum jelas, koordinasi antar-OPD lemah, dan kapasitas SDM terbatas. Selain itu, Zulkarnaen (2025) menunjukkan bahwa alokasi anggaran lingkungan belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan akibat keterbatasan anggaran dan prioritas kebijakan yang beragam. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *green budgeting* masih memerlukan penguatan, khususnya dalam integrasi antara kebijakan, program, dan penganggaran.

Dalam kerangka *green budgeting*, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan ke dalam keseluruhan proses penganggaran pemerintah. OECD mengembangkan *Green Budgeting Framework* yang terdiri dari empat elemen utama, yaitu *strong strategic framework*, *tools for evidence generation and policy coherence*, *reporting to facilitate accountability and transparency*, serta *an enabling budgetary governance framework*. Keempat elemen tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menilai sejauh mana kebijakan dan anggaran pemerintah telah mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, kerangka tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk mengkaji penerapan *green budgeting* dalam perencanaan anggaran di DLHK DIY.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *green budgeting* dalam perencanaan anggaran untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan studi kasus pada DLHK DIY. Penelitian ini berfokus pada proses integrasi aspek lingkungan ke dalam perencanaan anggaran di tingkat perangkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi penerapan *green budgeting*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran berbasis lingkungan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis penerapan *green budgeting* dalam perencanaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali makna serta keunikan objek yang diteliti, memahami proses maupun interaksi sosial, dan menganalisis data dengan pendekatan deskriptif (Nasution, 2023). Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan konteks dari setiap temuan yang diperoleh di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana prinsip *green budgeting* diintegrasikan dalam proses perencanaan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat hasil, tetapi juga proses yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini dinilai relevan untuk mengkaji fenomena kebijakan yang bersifat kompleks dan kontekstual.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam proses perencanaan anggaran di DLHK DIY. Informan tersebut meliputi pihak perencana, pengelola keuangan, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan isu lingkungan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta laporan realisasi anggaran tahunan. Selain dokumen pemerintah, penelitian ini juga memanfaatkan literatur dan regulasi yang relevan dengan *green budgeting*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait penerapan *green budgeting* dan kendala yang dihadapi. Peneliti menggunakan pedoman wawancara, namun tetap memberikan ruang fleksibilitas agar informan dapat menyampaikan informasi secara lebih luas. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program dan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran di DLHK DIY. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen perencanaan dan kebijakan sebagai bahan pendukung analisis. Ketiga teknik ini digunakan secara bersamaan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Data yang diperoleh kemudian diseleksi dan difokuskan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk yang terstruktur agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dari data yang telah dianalisis.

## PEMBAHASAN

### Strong Strategic Framework

Dalam kerangka *green budgeting* menurut OECD, elemen *strong strategic framework* menekankan pentingnya komitmen kebijakan yang kuat dalam mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam perencanaan anggaran. Komitmen ini tidak hanya dilihat dari keberadaan dokumen kebijakan, tetapi juga dari konsistensi antara visi pembangunan, prioritas program, dan alokasi anggaran yang nyata. Tanpa konsistensi tersebut, kebijakan lingkungan berisiko menjadi sekadar dokumen formalitas yang tidak berdampak pada perubahan struktural. Oleh karena itu, keberadaan kerangka strategis menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang terencana dan terukur. Kerangka ini juga berfungsi sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menyelaraskan program kerja dengan tujuan lingkungan jangka panjang. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan lingkungan berpotensi hanya berhenti pada tataran perencanaan tanpa terwujud dalam tindakan konkret. Oleh karena itu, keterkaitan antara kebijakan dan implementasi menjadi aspek yang sangat penting untuk dianalisis secara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah DIY telah memiliki kerangka kebijakan yang cukup kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam dokumen RPJMD, Renstra DLHK, serta RKPD yang telah mengakomodasi isu lingkungan sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Program-program seperti pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan konservasi sumber daya alam juga telah dirumuskan secara sistematis. Selain itu, adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ekonomi Hijau semakin memperkuat arah kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan kesadaran kelembagaan yang cukup tinggi, di mana secara konseptual integrasi isu lingkungan telah tertanam sebagai bagian integral dari kerangka perencanaan pembangunan daerah DIY.

Namun, apabila dianalisis lebih lanjut, integrasi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam aspek penganggaran. Program lingkungan masih harus bersaing dengan sektor lain dalam memperoleh alokasi anggaran yang memadai, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen kebijakan dengan

implementasi fiskal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen kebijakan dengan implementasi fiskal. Akibatnya, tidak semua program lingkungan dapat diakomodasi secara optimal dalam proses penganggaran tahunan. Kesenjangan ini mencerminkan tantangan klasik dalam penerapan green budgeting, di mana komitmen politik belum selalu berbanding lurus dengan dukungan sumber daya yang dialokasikan.

Dari sisi implementasi, berbagai program lingkungan memang telah dilaksanakan oleh DLHK DIY sebagai komitmen nyata di lapangan. Upaya seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengendalian pencemaran udara dan air, serta program konservasi sumber daya alam menunjukkan adanya gerakan yang konsisten meskipun dengan keterbatasan anggaran. Keberadaan program-program tersebut juga mencerminkan kapasitas birokrasi yang relatif responsif terhadap isu lingkungan di tingkat daerah. Namun, permasalahan lingkungan seperti timbulan sampah yang terus meningkat dan pencemaran yang belum tertangani sepenuhnya masih tetap menjadi isu utama yang dihadapi DIY. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan kebijakan belum sepenuhnya diikuti dengan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program. Masih dibutuhkan penguatan kapasitas teknis, koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran yang lebih proporsional agar program-program tersebut dapat memberikan dampak yang lebih signifikan. Dengan demikian, *strong strategic framework* di DIY telah terbentuk secara kebijakan, tetapi masih memerlukan penguatan yang lebih substansial dalam integrasi dengan penganggaran dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

## Tools for Evidence Generation and Policy Coherence

Dalam kerangka OECD, elemen *tools for evidence generation and policy coherence* menekankan pentingnya instrumen yang mampu menghasilkan data yang relevan serta memastikan keterpaduan antara kebijakan, program, dan anggaran. Instrumen ini berperan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih akuntabel dan terukur. Tanpa ketersediaan data yang memadai, perumusan kebijakan lingkungan berisiko bersifat reaktif dan tidak terarah. Selain itu, keberadaan data yang akurat juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Keterpaduan kebijakan (*policy coherence*) sendiri mensyaratkan bahwa setiap instrumen yang digunakan mampu menjembatani tujuan strategis dengan tindakan operasional di lapangan. Oleh karena itu, kualitas dan konsistensi penggunaan instrumen menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi *green budgeting*.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah DIY telah memiliki beberapa instrumen pendukung yang cukup beragam, seperti *climate budget tagging*, indikator lingkungan (IKLH), serta sistem monitoring melalui aplikasi SENGGUH. Keberadaan instrumen-instrumen tersebut menunjukkan adanya upaya yang terstruktur dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Aplikasi SENGGUH, memungkinkan pemantauan capaian program lingkungan secara lebih sistematis dan transparan dibandingkan mekanisme pelaporan konvensional. Selain itu, dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renstra DLHK juga berperan penting dalam menjaga keselarasan antara arah kebijakan dan program yang dilaksanakan. Dalam praktiknya, instrumen-instrumen ini membantu perangkat daerah dalam mengidentifikasi prioritas program lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Penggunaan IKLH sebagai indikator kinerja lingkungan juga memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi lingkungan hidup di DIY dari tahun ke tahun. Dengan demikian, DIY telah merintis fondasi yang cukup kuat dalam membangun ekosistem data lingkungan yang mendukung perencanaan berbasis bukti. Hal ini menjadi modal penting yang perlu terus diperkuat agar proses penganggaran dapat semakin responsif terhadap dinamika permasalahan lingkungan.

Selain itu, adanya pendekatan penganggaran tematik seperti penganggaran perubahan iklim dan responsif gender juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki pengalaman dalam mengembangkan instrumen berbasis analisis. Penggunaan GAP, GBS, dan GAB dalam sistem perencanaan responsive gender memperlihatkan bahwa proses perencanaan telah mulai

mempertimbangkan aspek inklusivitas dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi indikasi bahwa pendekatan berbasis data sebenarnya sudah mulai tumbuh dalam sistem pemerintahan daerah DIY. Maka secara struktural, instrumen pendukung telah tersedia dan cukup beragam untuk menopang implementasi *policy coherence* yang lebih kuat.

Namun, pemanfaatan instrumen-instrumen tersebut dalam praktiknya masih belum optimal dan merata. Penerapan *climate budget tagging* yang belum dilakukan secara konsisten setiap tahunnya menyebabkan cakupan data yang dihasilkan masih terbatas, sehingga menyulitkan proses analisis komparatif antartahun secara akurat dan andal. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat teknis juga menjadi kendala dalam menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Secara konseptual, temuan ini sejalan dengan pandangan Zulkarnaen (2025) yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program lingkungan, sebagaimana juga ditemukan dalam konteks penganggaran berbasis lingkungan di Kabupaten Malang. Inkonsistensi dalam penggunaan instrumen ini menyebabkan keterkaitan antara program yang dilaksanakan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan belum sepenuhnya dapat diukur secara akurat. Akibat berbagai keterbatasan tersebut, pengambilan keputusan anggaran belum sepenuhnya dapat dikatakan berbasis bukti yang kuat dan terverifikasi. Pada akhirnya, potensi besar yang dimiliki instrumen-instrumen tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih signifikan.

Dari sisi implementasi, kondisi ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara perencanaan yang telah disusun dan kondisi nyata di lapangan. Permasalahan lingkungan yang masih terus terjadi menunjukkan bahwa instrumen yang ada belum mampu mendorong kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Kualitas data yang belum memadai turut berkontribusi pada lemahnya daya dorong instrumen dalam mengubah pola pengambilan keputusan di tingkat penganggaran. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan secara sistematis, mulai dari standarisasi penggunaan instrumen hingga peningkatan kompetensi aparatur dalam menginterpretasikan data lingkungan. Investasi dalam pengembangan sistem data yang terintegrasi juga menjadi kebutuhan mendesak agar *evidence generation* dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, meskipun instrumen telah tersedia dan cukup beragam, pemanfaatannya masih perlu diperkuat secara substansial agar dapat mendukung *policy coherence* secara lebih optimal dan berdampak nyata.

## Reporting to Facilitate Accountability and Transparency

Elemen *reporting to facilitate accountability and transparency* dalam kerangka OECD menekankan pentingnya sistem pelaporan yang mampu mengaitkan antara penggunaan anggaran dengan dampak yang dihasilkan. Pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai alat evaluasi kebijakan yang dapat mendorong perbaikan berkelanjutan. Sistem pelaporan yang berkualitas memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai sejauh mana alokasi anggaran telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan lingkungan. Selain itu, sistem pelaporan yang baik juga berperan dalam meningkatkan transparansi kepada publik sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Dalam perspektif *green budgeting*, pelaporan yang efektif seharusnya mampu menghubungkan data fiskal dengan data kinerja lingkungan secara terintegrasi dan mudah diakses. Oleh karena itu, kualitas dan aksesibilitas pelaporan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kematangan penerapan *green budgeting* di suatu daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan di DIY telah berjalan secara terstruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perangkat daerah, termasuk DLHK, menyusun laporan secara berkala yang mencakup realisasi anggaran dan capaian kinerja. Dokumen pelaporan tersebut meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Realisasi Anggaran, serta laporan capaian indikator kinerja yang disusun secara periodik. Selain itu, penggunaan sistem digital seperti SENGGUH juga mempermudah proses monitoring dan evaluasi. Sistem ini memungkinkan

pemerintah daerah untuk memantau pelaksanaan program secara lebih terintegrasi dan real-time dibandingkan mekanisme pelaporan manual sebelumnya. Keberadaan SENGGUH juga membuka peluang bagi peningkatan akuntabilitas internal karena setiap capaian program dapat terdokumentasi dengan lebih rapi dan dapat ditelusuri dengan lebih mudah. Dengan adanya berbagai mekanisme tersebut, DIY menunjukkan komitmen yang cukup serius dalam membangun budaya pelaporan yang tertib dan terstruktur. Fondasi ini merupakan syarat penting yang perlu terus dikembangkan menuju sistem pelaporan yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga bermakna secara substantif.

Namun dalam praktiknya, sistem pelaporan yang ada masih berfokus pada aspek administratif dan pemenuhan kewajiban formal. Laporan yang disusun belum secara spesifik mengaitkan penggunaan anggaran dengan dampak lingkungan yang dihasilkan, sehingga menyulitkan penilaian efektivitas kebijakan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaporan di DIY masih berada pada tahap *compliance-based reporting* dan belum bergerak menuju *performance-based reporting* yang lebih substansial. Dibutuhkan transformasi dalam pendekatan pelaporan agar tidak sekadar mencatat apa yang telah dilakukan, tetapi juga mampu menunjukkan apa yang telah berubah akibat intervensi kebijakan tersebut.

Dari perspektif transparansi publik, informasi yang disajikan dalam laporan juga masih bersifat teknis dan kurang mudah dipahami oleh masyarakat. Meskipun laporan telah tersedia, informasi yang disajikan masih bersifat teknis dan administratif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dampak nyata dari program yang dilaksanakan terhadap lingkungan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara laporan yang disusun dengan kondisi di lapangan. Diperlukan inovasi dalam format dan penyajian laporan, misalnya melalui infografis atau dashboard publik, agar informasi lingkungan dapat dikomunikasikan secara lebih inklusif dan mudah diakses. Dengan demikian, penguatan sistem pelaporan tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga dimensi komunikasi publik yang selama ini masih kurang mendapat perhatian.

## An Enabling Budgetary Governance Framework

Dalam kerangka OECD, elemen *an enabling budgetary governance framework* menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang mampu mendukung integrasi aspek lingkungan secara menyeluruh. Tata kelola ini mencakup mekanisme perencanaan, penganggaran, serta koordinasi antar perangkat daerah. Tanpa tata kelola yang kondusif, berbagai instrumen dan komitmen kebijakan yang telah dibangun berisiko tidak dapat diterjemahkan menjadi alokasi anggaran yang efektif. Selain itu, sistem penganggaran juga harus mampu mengarahkan prioritas pembangunan sesuai dengan tujuan keberlanjutan, bukan hanya merespons tekanan politik atau kebutuhan jangka pendek. Sehingga, tata kelola anggaran menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi *green budgeting* secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem penganggaran di DIY telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan memiliki struktur prosedural yang cukup tertib. Proses perencanaan anggaran dilakukan melalui tahapan RKA oleh masing-masing perangkat daerah, pembahasan dengan TAPD, hingga penetapan DPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran. Secara administratif, sistem ini telah terstruktur dan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, terdapat keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan adanya integrasi prosedural. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan juga memberikan kerangka evaluasi terhadap capaian program, meskipun penerapannya masih terus disempurnakan. Pengalaman panjang DIY dalam mengelola sistem penganggaran daerah menjadi modal kelembagaan yang penting dalam upaya transisi menuju *green budgeting* yang lebih sistematis. Dengan fondasi prosedural yang sudah ada, tantangan utama yang dihadapi bukan lagi membangun sistem dari nol, melainkan mendorong transformasi orientasi sistem yang sudah berjalan agar lebih responsif terhadap isu lingkungan.

Namun dalam praktiknya, sistem penganggaran tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengadopsi pendekatan *green budgeting* yang terstruktur. Program lingkungan masih dimasukkan

dalam struktur anggaran sektoral tanpa klasifikasi khusus yang membedakannya dari program pembangunan lainnya, sehingga menyulitkan identifikasi kontribusi anggaran terhadap tujuan lingkungan. Ketiadaan kode atau label khusus untuk belanja hijau juga menyebabkan agregasi data pengeluaran lingkungan tidak dapat dilakukan secara akurat dan menyeluruh. Selain itu, keterbatasan pagu anggaran yang tersedia membuat program lingkungan senantiasa harus bersaing dengan sektor-sektor lain yang juga memiliki prioritas tinggi. Kondisi ini pada akhirnya menempatkan isu lingkungan dalam posisi yang rentan terhadap pemotongan anggaran ketika terjadi tekanan fiskal.

Dari sisi koordinasi, integrasi antar perangkat daerah juga masih menghadapi tantangan. Isu lingkungan yang pada dasarnya bersifat lintas sektor memerlukan sinergi yang kuat antara DLHK dengan dinas-dinas terkait lainnya, namun dalam praktiknya koordinasi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Selain itu, faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan tidak hanya berasal dari sistem anggaran, tetapi juga dari aspek sosial. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih formal dan mengikat, seperti forum lintas OPD yang memiliki mandat jelas dalam mengintegrasikan program lingkungan. Dengan demikian, penguatan tata kelola tidak cukup hanya dilakukan pada dimensi anggaran, tetapi harus mencakup pembenahan pada dimensi koordinasi kelembagaan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, tata kelola anggaran di DIY telah memiliki dasar yang cukup kuat, tetapi belum sepenuhnya mendukung integrasi aspek lingkungan secara sistematis ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Ketiadaan kerangka *green budgeting* yang terstruktur menjadi salah satu penyebab utama mengapa komitmen kebijakan yang ada belum dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam alokasi sumber daya yang memadai. Diperlukan reformasi bertahap dalam sistem penganggaran, mulai dari pengenalan klasifikasi belanja hijau, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *green budgeting*. Transformasi ini tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang yang didukung oleh kepemimpinan politik yang kuat dan konsisten. Oleh karena itu, langkah paling pertama yang perlu diambil adalah menetapkan roadmap implementasi *green budgeting* yang jelas dan terukur sebagai panduan bagi seluruh perangkat daerah DIY. Dengan arah yang jelas dan dukungan kelembagaan yang memadai, DIY memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu daerah pelopor dalam penerapan *green budgeting* di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penerapan *green budgeting* dalam perencanaan anggaran di DLHK DIY menunjukkan bahwa integrasi aspek lingkungan telah mulai dilaksanakan, terutama melalui dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra yang secara eksplisit menempatkan isu lingkungan sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Selain itu, keberadaan instrumen seperti *climate budget tagging*, indikator kualitas lingkungan hidup (IKLH), dan sistem monitoring SENGGUH juga mencerminkan adanya langkah awal yang cukup berarti dalam membangun ekosistem penganggaran berbasis lingkungan. Namun, integrasi yang telah dilakukan masih bersifat parsial dan belum tertanam secara sistematis dalam keseluruhan proses penganggaran daerah. Sejumlah kendala masih menghambat penerapan *green budgeting* secara, di antaranya meliputi belum tersedianya kerangka sistem yang terstruktur, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta minimnya data dan analisis yang mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah yang belum optimal serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan turut mempengaruhi efektivitas implementasi. Meskipun demikian, perencanaan anggaran yang dilaksanakan oleh DLHK DIY telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui program pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam integrasi kebijakan, penganggaran, dan pelaksanaan program guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif, termasuk SDGs 11 dan SDGs 13.

## REFERENSI

- Badan Kebijakan Fiskal. (2024). *Climate Budget Tagging*.
- Erik, A. (2018). Urbanisasi Dan Dampak Terhadap Pencemaran Udara Atau Polusi Udara Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, May*.
- Fathia, S. N. (2025). Hubungan Antara Transparansi Anggaran dan Partisipasi Publik Dalam Green Budgeting Pemerintah Pusat. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2).
- Kusumawati, A., Ala, A., Nohong, M., Halim, A., Najemah, Ulfawati, A., Thaha, R. R. H., Oemar, M. A. F. I., Dharsana, M. T., Natsir, A. I. P., & Hermansyah, F. I. (2025). *Harmoni Dengan Alam Mitigasi dan Pelestarian Lingkungan*. Penerbit K-Media.
- Mutmainah, S., Wijiono, S., & Romadhon, M. R. (2025). Potensi Green budgeting dalam Meningkatkan Efisiensi Pengeluaran Publik untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Universitas Islam Jember , Indonesia mempertimbangkan kelestarian lingkungan dalam semua kebijakan pembangunan . Oleh. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(2), 78–90.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In *CV. Harva Creative*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- OECD. (2021). *Green Budgeting in OECD Countries*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/acf5d047-en>
- Putra, N. (2024). *Anggaran Perlindungan Lingkungan Berkurang, Fitra Pertanyakan Komitmen Transformasi Ekonomi Hijau Jokowi dan Prabowo*. TEMPO. [https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-perlindungan-lingkungan-berkurang-fitra-pertanyakan-komitmen-transformasi-ekonomi-hijau-jokowi-dan-prabowo-16821?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-perlindungan-lingkungan-berkurang-fitra-pertanyakan-komitmen-transformasi-ekonomi-hijau-jokowi-dan-prabowo-16821?utm_source=chatgpt.com)
- Salahudin, S., Syahri, M., Cahyani, T. D., & Firdaus, M. (2025). Green Budgeting Review at Local Government: Case Study of Batu Government, Indonesia. *Journal of Governance & Civil Society*, 9(1), 172–193.
- Vanessa, V., Timang, S., Damayanti, R. A., & Kusumawati, A. (2025). *Building A Green Future : Green Budgeting as a Driver of Change*. 3576, 1384–1415.
- Zulkarnaen, A. (2025). Penerapan Green Budgeting Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Malang. *Repository IPDN*, 1–14.